

## ABSTRACT

Urban Green Spaces (UGS) play a vital role in ecological sustainability, social well-being, and urban resilience, yet their provision in Jakarta remains well below the mandated 30% target. This study investigates how stakeholder dynamics shape the creation and management of UGS in Jakarta by applying the Matrix of Alliances and Conflicts: Tactics, Objectives, and Recommendations (MACTOR) framework. Using primary data from interviews with eight key actors—government agencies, NGOs, developers, and communities—triangulated with secondary policy documents, the analysis mapped influence–dependence relations and stakeholder positions on strategic objectives. Findings indicate that UGS governance in Jakarta is marked by broad consensus on technical management objectives (e.g., database development, protection, accessibility) but is weakened by systemic deficiencies in accountability, meaningful participation, and political motivation. No dominant actors exist; instead, governance outcomes depend on negotiation and coalition building across interdependent stakeholders. Policy recommendations include strengthening participation protocols, embedding UGS commitments in long-term plans, and establishing an integrated UGS database. By offering a systematic relational analysis of actors, this study advances stakeholder theory and collaborative governance literature while providing actionable insights for achieving Jakarta’s UGS targets and contributing to Sustainable Development Goal 11.

**Keywords:** Urban Green Space (UGS); Stakeholder Dynamics; MACTOR; Collaborative Governance; Jakarta; Urban Policy; Sustainability

## INTISARI

*Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTH) memiliki peran penting dalam keberlanjutan ekologi, kesejahteraan sosial, dan ketahanan kota, namun penyediaannya di Jakarta masih jauh dari target wajib 30%. Studi ini meneliti bagaimana dinamika pemangku kepentingan membentuk penciptaan dan pengelolaan RTH di Jakarta dengan menerapkan kerangka Matrix of Alliances and Conflicts: Tactics, Objectives, and Recommendations (MACTOR). Dengan menggunakan data primer dari wawancara bersama delapan aktor kunci—lembaga pemerintah, LSM, pengembang, dan komunitas—triangulasi dengan dokumen kebijakan sekunder, analisis ini memetakan hubungan pengaruh–ketergantungan dan posisi para pemangku kepentingan terhadap tujuan strategis. Temuan menunjukkan bahwa tata kelola RTH di Jakarta ditandai oleh adanya konsensus luas terkait tujuan manajemen teknis (misalnya, pengembangan basis data, perlindungan, aksesibilitas), namun dilemahkan oleh kekurangan sistemik dalam akuntabilitas, partisipasi bermakna, dan motivasi politik. Tidak ada aktor dominan; sebaliknya, hasil tata kelola bergantung pada negosiasi dan pembangunan koalisi di antara para pemangku kepentingan yang saling bergantung. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan protokol partisipasi, pengintegrasian komitmen RTH dalam rencana jangka panjang, dan pembentukan basis data RTH yang terintegrasi. Dengan menawarkan analisis relasional yang sistematis atas para aktor, studi ini memperkaya teori pemangku kepentingan dan literatur tata kelola kolaboratif sekaligus memberikan wawasan praktis untuk mencapai target RTH Jakarta serta berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 11.*

**Kata kunci:** Ruang Terbuka Hijau (RTH); Dinamika Pemangku Kepentingan; MACTOR; Tata Kelola Kolaboratif; Jakarta; Kebijakan Perkotaan; Keberlanjutan